



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI JUMAT, 3 JULI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

80 Kades Baru Sidoarjo Dilantik

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Sebanyak 80 kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Sidoarjo resmi dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Bupati Sidoarjo Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Senin 29 Juni 2026.

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Ketua DPRD Sidoarjo, jajaran Forkopimda, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Sidoarjo.

Bupati mengatakan, pelantikan kepala desa bukanlah akhir dari sebuah kontestasi politik, melainkan awal dari pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, jabatan kepala desa merupakan amanah yang diberikan rakyat sekaligus tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

"Mulai hari ini tidak ada lagi sekat-sekat perbedaan. Tidak ada lagi nomor urut atau kelompok pendukung. Yang ada sekarang adalah kepala desa yang wajib melayani seluruh



Pelantikan 80 kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026.

masyarakat tanpa membedakan pilihan politik," pintanya.

Bupati mengajak seluruh kepala desa yang baru dilantik untuk segera merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk para calon kepala desa yang sebelumnya menjadi

lawan dalam Pilkades beserta para pendukungnya.

Menurutnya, kebersamaan menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan desa. "Setelah kembali ke desa masing-masing, saya berharap seluruh calon yang kemarin berkompe-

tisi bisa dirangkul. Sekarang tidak lagi lawan, yang ada adalah ka-
delapan tahun masa jabatan bu-
waktu yang singkat. Jangan sa-
habis hanya untuk memikirkan
lik politik. Gunakan waktu itu u-
membangun desa," ajaknya.

Ia optimis visi dan misi ke-
desa akan lebih mudah diwujudkan
apabila pemerintahan desa di-
gunakan dengan semangat persat-
kerukunan, dan kesempatan
lain kesempatan tersebut, Bt
Subandi juga memberikan per-
khusus kepada kepala desa yang
pertama kali menjabat.

Dari 80 kepala desa yang di-
hanya 17 kepala desa merupakan
ahana, sedangkan sisanya merup-
wah-wajah baru, termasuk yar
belumnya menjabat sebagai sekre-
desa maupun perangkat desa.

Karena itu, ia meminta D
Pemberdayaan Masyarakat
Desa (DPMDS) bersama para ci-
agar segera memberikan pe-
naan dan pembekalan kepada
kepala desa baru. (md/rus)

HIPMI Sidoarjo Resmikan Bioflok

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Sidoarjo meresmikan Program Integrated Farming Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Bioflok. Ini sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong lahirnya pengusaha baru di sektor perikanan.

Program yang merupakan bagian dari bantuan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI itu diresmikan di dua lokasi, yakni Pokdakan Cahaya Muda Gemilang di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi pada 30 Juni 2026 dan Pokdakan Wiwit Mulyo di Desa Watugolong, Kecamatan Krian pada 1 Juli 2026.

Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Sidoarjo, Muh. Zakaria Dimas Pratama mengatakan, program tersebut merupakan implementasi konsep Sapta Delta yang menghubungkan berbagai potensi daerah ke dalam satu ekosistem ekonomi terpadu. "Peresmian ini bukan sekadar seremoni penyerahan bantuan, tetapi menjadi tonggak dimulainya pembangunan sebuah ekosistem ekonomi baru yang menghubungkan seluruh mata rantai usaha dari hulu hingga hilir," kata Zakaria Dimas dalam keterangannya, Kamis (27/7/2026).

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi daerah bukan karena minim potensi, melainkan belum terhubungnya berbagai potensi yang dimiliki masyarakat. "Ketika seluruh potensi itu dipertemukan dalam satu ekosistem yang saling terhubung, maka yang tumbuh bukan hanya satu usaha, tetapi seluruh ekosistem ekonomi daerah. Itulah semangat Sapta Delta yang sedang kami bangun melalui Integrated Farming," ujarnya.

Dalam program tersebut, HIPMI Sidoarjo membina dua Kelompok Pembudidayaan Ikan (Pokdakan) sistem bioflok dan tiga kelompok budidaya ayam petelur sebagai model integrated farming yang menggabungkan sektor perikanan, peternakan, kewirausahaan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Masing-masing kelompok penerima bantuan memperoleh satu unit bangunan pendukung budidaya, delapan kolam bioflok, 20 ribu benih ikan air tawar, serta 1,8 ton pakan pelet untuk satu siklus budidaya. (md/rus)



Subsidi Sampai 60 Persen, Biaya Haji 2027 Bisa Turun

Kemenhaj Sebut
Usulan Telah
Disampaikan ke DPR

KOTA TANGERANG – Kabar baik bagi calon jemaah haji yang berangkat tahun depan. Biaya haji pada 2027 bisa mengalami penurunan yang signifikan karena alokasi subsidi dipertahankan dibandingkan beberapa tahun terakhir (lihat grafis).
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Siman-

RATA-RATA BIAYA HAJI LIMA TAHUN TERAKHIR

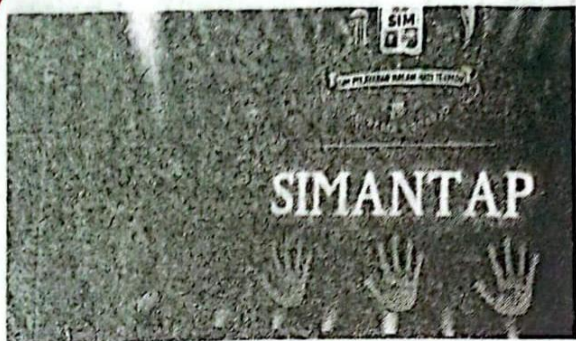
Tahun	Total Biaya Haji	Ditanggung Jemaah	Subsidi BPKH
2026	Rp 87,4 juta	Rp 54,1 juta (62 persen)	Rp 33,2 juta (38 persen)
2025	Rp 89,4 juta	Rp 55,4 juta (62 persen)	Rp 33,9 juta (38 persen)
2024	Rp 93,4 juta	Rp 56 juta (60 persen)	Rp 37,3 juta (40 persen)
2023	Rp 90 juta	Rp 49,8 juta (55,3 persen)	Rp 40,2 juta (44,7 persen)
2022	Rp 81,7 juta	Rp 39,8 juta (48,8 persen)	Rp 41,8 juta (51,2 persen)

Keterangan

Subsidi BPKH diambil dari sebagian hasil pengelolaan/investasi dana haji
Sumber : Kemenhaj & Kemenag



GRAFIS: HERLAMANG/JAWA POI



Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Dr Christian Tobing di peluncuran layanan SIMANTAP.

Polresta Sidoarjo
Luncurkan Layanan
SIM Malam Hari



Cakades Suparlan dan Ketua Forum BPD Sidoarjo Sigit Setiawan.

Pilkades Balongdowo
Berbuntut Gugatan

80 Kades Baru Sidoarjo Dilantik

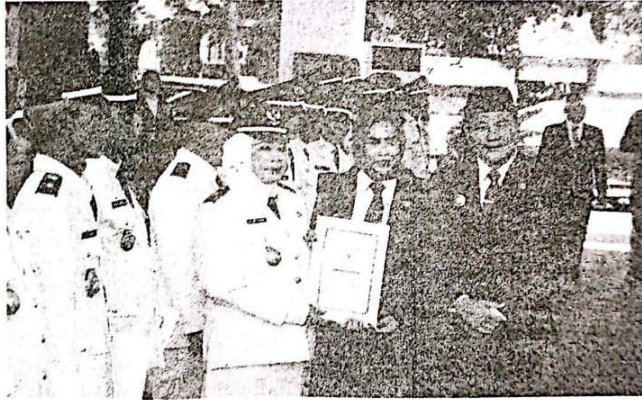
Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Sebanyak 80 kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Sidoarjo resmi dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Bupati Sidoarjo Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Senin 29 Juni 2026.

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Ketua DPRD Sidoarjo, jajaran Forkopimda, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Sidoarjo.

Bupati mengatakan, pelantikan kepala desa bukanlah akhir dari sebuah kontestasi politik, melainkan awal dari pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, jabatan kepala desa merupakan amanah yang diberikan rakyat sekaligus tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

"Mulai hari ini tidak ada lagi sekat-sekat perbedaan. Tidak ada lagi nomor urut atau kelompok pendukung. Yang ada sekarang adalah kepala desa yang wajib melayani seluruh



Pelantikan 80 kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026.

masyarakat tanpa membedakan pilihan politik," pintanya.

Bupati mengajak seluruh kepala desa yang baru dilantik untuk segera merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk para calon kepala desa yang sebelumnya menjadi

lawan dalam Pilkades beserta para pendukungnya.

Menurutnya, kebersamaan menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan desa. "Setelah kembali ke desa masing-masing, saya berharap seluruh calon yang kemarin berkompe-

tisi bisa dirangkul. Sekarang tidak ada lagi lawan, yang ada adalah kawan. Delapan tahun masa jabatan bukan waktu yang singkat. Jangan sampai habis hanya untuk memikirkan konflik politik. Gunakan waktu itu untuk membangun desa," ajaknya.

Ia optimistis visi dan misi kepala desa akan lebih mudah diwujudkan apabila pemerintahan desa dibangun dengan semangat persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi juga memberikan perhatian khusus kepada kepala desa yang baru pertama kali menjabat.

Dari 80 kepala desa yang dilantik, hanya 17 kepala desa merupakan petahana, sedangkan sisanya merupakan wajah-wajah baru, termasuk yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris desa maupun perangkat desa.

Karena itu, ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama para camat agar segera memberikan pembinaan dan pembekalan kepada para kepala desa baru. (md/rus)

HIPMI Sidoarjo Resmikan Bioflok

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Sidoarjo meresmikan Program Integrated Farming Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Bioflok. Ini sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong lahirnya pengusaha baru di sektor perikanan.

Program yang merupakan bagian dari bantuan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI itu diresmikan di dua lokasi, yakni Pokdakan Cahaya Muda Gemilang di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi pada 30 Juni 2026 dan Pokdakan Wiwit Mulyo di Desa Watugolong, Kecamatan Krian pada 1 Juli 2026.

Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Sidoarjo, Muh. Zakaria Dimas Pratama mengatakan, program tersebut merupakan implementasi konsep Sapta Delta yang menghubungkan berbagai potensi daerah ke dalam satu ekosistem ekonomi terpadu. "Peresmian ini bukan sekadar seremoni penyerahan bantuan, tetapi menjadi tonggak dimulainya pembangunan sebuah ekosistem ekonomi baru yang menghubungkan seluruh mata rantai usaha dari hulu hingga hilir," kata Zakaria Dimas dalam keterangannya, Karnis (2/7/2026).

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi daerah bukan karena minim potensi, melainkan belum terhubungnya berbagai potensi yang dimiliki masyarakat. "Ketika seluruh potensi itu dipertemukan dalam satu ekosistem yang saling terhubung, maka yang tumbuh bukan hanya satu usaha, tetapi seluruh ekosistem ekonomi daerah. Itulah semangat Sapta Delta yang sedang kami bangun melalui Integrated Farming," ujarnya.

Dalam program tersebut, HIPMI Sidoarjo membina dua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sistem bioflok dan tiga kelompok budidaya ayam petelur sebagai model integrated farming yang menggabungkan sektor perikanan, peternakan, kewirausahaan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Masing-masing kelompok penerima bantuan memperoleh satu unit bangunan pendukung budidaya, delapan kolam bioflok, 20 ribu benih ikan air tawar, serta 1,8 ton pakan pelet untuk satu siklus budidaya. (md/rus)



HIPMI Sidoarjo meresmikan Program Integrated Farming Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Bioflok sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan.



Cakades Suparlan dan Ketua Forum BPD
Sidoarjo Sigit Setiawan.

Pilkades Balongdowo Berbuntut Gugatan

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Prosesi pilkades serentak Kabupaten Sidoarjo yang digelar 24 Mei 2026, sebanyak 80 desa menyelenggarakan pilkades serentak. Dari 80 desa itu terdapat 13 desa calon kades dari unsur perangkat desa.

Dan, dari 13 desa yang calonnya terdapat dari perangkat desa, terdapat 1 desa, yaitu Balongdowo Kecamatan Candi yang calon kadesnya ditetapkan pada tahap III, 5 Mei 2026. Dari sini polemik ini bermula dan berujung gugatan di pengadilan yang kini tengah berjalan. Salah satu cakades yakni Suparlan menggugat ke PTUN didampingi kuasa hukumnya Djupri SH MHum.

Sigit Setiawan SSo SH, Ketua Forum BPD Sidoarjo mengatakan, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2026, Pasal 42 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa perangkat desa yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa wajib mengundurkan diri.

Syarat ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon dari perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa yang penetapan pencalonannya di tahap III, yaitu 5 Mei 2026. Calon penetapan kadesnya pada tahap I atau II cukup cuti saja karena penetapannya sebelum PP No.16 Tahun 2026 diundangkan pada 27 Maret 2026. (md/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Subsidi Sampai 60 Persen, Biaya Haji 2027 Bisa Turun

Kemenhaj Sebut
Usulan Telah
Disampaikan ke DPR

KOTA TANGERANG – Kabar baik bagi calon jemaah haji yang berangkat tahun depan. Biaya haji pada 2027 bisa mengalami penurunan yang signifikan karena alokasi subsidi dipertinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir (lihat grafis).

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, saat ini pemerintah sedang membahas besaran biaya haji 2027 secara komprehensif. Secara faktual, sejumlah komponen biaya haji mengalami kenaikan akibat gejolak ekonomi dan geopolitik global.

Namun, pihaknya berupaya agar biaya haji tahun depan bisa lebih

RATA-RATA BIAYA HAJI LIMA TAHUN TERAKHIR

Tahun	Total Biaya Haji	Ditanggung Jemaah	Subsidi BPKH
2026	Rp 87,4 juta	Rp 54,1 juta (62 persen)	Rp 33,2 juta (38 persen)
2025	Rp 89,4 juta	Rp 55,4 juta (62 persen)	Rp 33,9 juta (38 persen)
2024	Rp 93,4 juta	Rp 56 juta (60 persen)	Rp 37,3 juta (40 persen)
2023	Rp 90 juta	Rp 49,8 juta (55,3 persen)	Rp 40,2 juta (44,7 persen)
2022	Rp 81,7 juta	Rp 39,8 juta (48,8 persen)	Rp 41,8 juta (51,2 persen)

Keterangan

Subsidi BPKH diambil dari sebagian hasil pengelolaan/investasi dana haji

Sumber : Kemenhaj & Kemenag

murah ketimbang tahun ini. "Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto," katanya di sela penjemputan petugas haji di Bandara Soekarno-Hatta kemarin (2/7).

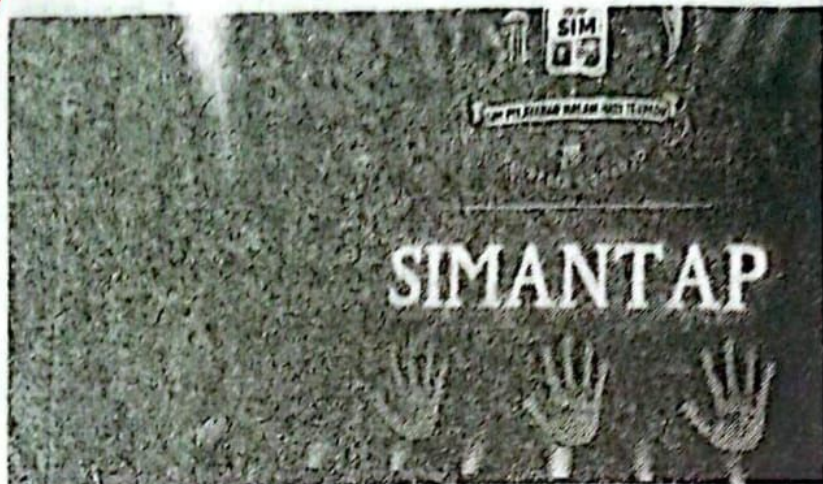
Dahnil menambahkan, komponen biaya haji yang ditanggung jemaah dan ada yang disubsidi dari nilai man-

faat pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Tahun ini beban jemaah sebesar 62 persen, sedangkan porsi subsidi-nya 38 persen. "Pada penyelenggaraan haji 2027, pemerintah mengupayakan proporsi itu berbalik," tandasnya. (wan/ttg)



Jawa Pos



Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Dr Christian Tobing di peluncuran layanan SIMANTAP.

Polresta Sidoarjo Luncurkan Layanan SIM Malam Hari

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Satlantas Polresta Sidoarjo resmi meluncurkan inovasi pelayanan terbaru. Tajuknya, SIMANTAP (SIM Pelayanan Malam Hari Terpadu). Program ini merupakan layanan SIM Keliling yang beroperasi pada malam hari untuk melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

Peluncuran program SIMANTAP menjadi salah satu langkah nyata Polresta Sidoarjo dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran layanan ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi para pekerja, pelajar, maupun masyarakat umum yang selama ini kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena padatnya aktivitas pada jam kerja.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Dr Christian Tobing SIK SH MH.MS menyampaikan, inovasi SIMANTAP merupakan bagian dari transformasi pelayanan Polri yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, serta kepuasan masyarakat. (cat/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Overkapasitas dan Minim Fasilitas, H. Dhamroni Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Desak
Percepatan Pembangunan Liponsos Wonoayu



SIDOARJO – Kondisi Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidoarjo yang berlokasi di eks gedung SMA Sidokare kian memprihatinkan. Mengingat fungsinya yang krusial, Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah daerah (Pemkab) untuk segera merealisasikan pembangunan gedung Liponsos baru di Wonoayu pada tahun depan. Keprihatinan ini muncul setelah Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Dhamroni Chudlori, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada Kamis (2/7/2026) siang. Kondisi Memprihatinkan: Anggaran Defisit, Aset Milik Provinsi Saat ini, bangunan bekas sekolah tersebut menampung sekitar 100 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Mayoritas penghuni merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), diusul oleh lansia telantar, gelandangan, pengemis, anak jalanan, hingga mantan penderita penyakit menular. "Kondisinya sangat memprihatinkan. Tempat tidur, meja, kursi, hingga fasilitas penunjang kesehatan sangat terbatas. Bahkan, anggaran makan dan minum (mamin) dari Dinas Sosial hanya dialokasikan untuk 80 orang, padahal kenyataannya ada 100 penghuni di sini," ungkap Gus Dham. Ironisnya, Pemkab Sidoarjo tidak bisa melakukan renovasi besar-besaran untuk memperbaiki fasilitas tersebut. Hal ini dikarenakan status aset tanah dan bangunan Liponsos Sidokare saat ini masih milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Akibatnya, Dinas Sosial terpaksa mengelolanya dengan keterbatasan yang ada. Untuk menutupi kebutuhan operasional, petugas di lapangan bahkan masih mengandalkan sumbangan masyarakat, terutama untuk pakaian layak pakai bagi para penghuni. "Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya para ASN yang memiliki pakaian bekas layak pakai, untuk bisa didonasikan ke Liponsos," tambah politisi PKS tersebut. Solusi Jangka Pendek dan Anggaran Rp30 Miliar di Wonoayu. Sebagai langkah cepat, Komisi D meminta agar anggaran operasional Liponsos ditambah melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun ini. Namun untuk jangka panjang, solusi mutlaknya adalah pemindahan ke fasilitas baru. Pemkab Sidoarjo sebenarnya sudah mengantongi lahan siap bangun seluas 2 hektare di Dusun Banar, Desa Ptlang, Kecamatan Wonoayu. Gus Dham menjelaskan, Komisi D sempat mengalokasikan anggaran awal melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, namun dibatalkan demi merujuk pada imbauan KPK terkait tata kelola anggaran. Oleh karena itu, ia mendorong agar proyek fisik ini langsung dicanangkan dalam APBD induk tahun depan. "Ini sifatnya sudah sangat urgen. Kami mendorong eksekutif agar pembangunan fisik di Wonoayu setidaknya mulai berjalan pada tahun 2027. Perencanaannya bisa dimasukkan di PAK APBD tahun ini, lalu tender di akhir tahun, sehingga awal tahun 2027 pengerjaan fisik bisa langsung running," tegasnya. Dinsos Sebut Bupati Setuju, Target Rampung 2028. Di sela-sela sidak, Gus Dham langsung menghubungi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, R. Mharta Wara Kusuma, melalui sambungan telepon. Mharta mengonfirmasi bahwa rencana pembangunan Liponsos Wonoayu ini sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh Bupati Subandi. Proyek pembangunan Liponsos baru tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp30 miliar. "Terima kasih atas kepedulian dan dukungan penuh dari DPRD. Dengan proyeksi anggaran sebesar itu, skenarionya bisa dibangun secara multiyears selama dua tahun. Dimulai tahun 2027 dan penyelesaian (finishing) pada tahun 2028," jelas Mharta. Meski demikian, Gus Dham menilai bahwa angka Rp30 miliar bukanlah beban berat bagi APBD Sidoarjo jika melihat urgensi sosial yang ada. Ia optimis proyek ini bisa diselesaikan lebih cepat. "Saya kira Sidoarjo mampu menyelesaikannya dalam waktu satu tahun saja. Anggaran Rp30 miliar itu tidak besar bagi daerah kita, dan kita pasti mampu," pungkas Gus Dham optimis.[dar/nata/red]





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Soroti Proyek Mangkrak Rp166,1 Miliar, Fraksi NasDem DPRD Sidoarjo
Desak Evaluasi Perencanaan APBD



KaMedia – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo menyoroti masih besarnya nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang mencapai Rp166,1 miliar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang penyampaian pendapat fraksi terhadap pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7). Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah agar tidak membebani APBD tahun 2026. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi NasDem, Muhamad Dimas Zakaria, menegaskan bahwa setiap anggaran yang gagal direalisasikan berarti ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. “Setiap rupiah yang gagal dibelanjakan adalah jalan yang seharusnya diperbaiki, saluran air yang semestinya dibangun, sekolah yang kualitasnya perlu ditingkatkan, hingga pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa dinikmati lebih luas oleh masyarakat,” tegas Dimas dalam rapat paripurna. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah. Mulai dari infrastruktur jalan yang belum memadai, pembangunan drainase yang belum tuntas, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, hingga pemerataan layanan kesehatan. Dimas juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka terkait proyek-proyek yang hingga kini masih berstatus KDP dengan nilai mencapai Rp166,1 miliar. Ia menilai transparansi penting agar publik mengetahui penyebab keterlambatan serta langkah penyelesaian yang akan dilakukan. “Fraksi kami mencermati masih terdapat nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp166,1 miliar. Kondisi ini menunjukkan masih adanya proyek pembangunan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran. Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka daftar proyek yang masih berstatus KDP, penyebab keterlambatan, target penyelesaiannya, serta potensi dampaknya terhadap APBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya. Selain menyoroti besarnya nilai KDP, Fraksi NasDem juga mencermati rendahnya serapan belanja modal serta tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Menurut Dimas, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masih perlu dibenahi. Fraksi NasDem berharap pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek pembangunan agar anggaran daerah dap





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Soroti Proyek Mangkrak Rp166,1 Miliar, Fraksi NasDem DPRD Sidoarjo
Desak Evaluasi Perencanaan APBD



KaMedia – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo menyoroti masih besarnya nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang mencapai Rp166,1 miliar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang penyampaian pendapat fraksi terhadap pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7). Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah agar tidak membebani APBD tahun 2026. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi NasDem, Muhamad Dimas Zakaria, menegaskan bahwa setiap anggaran yang gagal direalisasikan berarti ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. “Setiap rupiah yang gagal dibelanjakan adalah jalan yang seharusnya diperbaiki, saluran air yang semestinya dibangun, sekolah yang kualitasnya perlu ditingkatkan, hingga pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa dinikmati lebih luas oleh masyarakat,” tegas Dimas dalam rapat paripurna. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah. Mulai dari infrastruktur jalan yang belum memadai, pembangunan drainase yang belum tuntas, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, hingga pemerataan layanan kesehatan. Dimas juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka terkait proyek-proyek yang hingga kini masih berstatus KDP dengan nilai mencapai Rp166,1 miliar. Ia menilai transparansi penting agar publik mengetahui penyebab keterlambatan serta langkah penyelesaian yang akan dilakukan. “Fraksi kami mencermati masih terdapat nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp166,1 miliar. Kondisi ini menunjukkan masih adanya proyek pembangunan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran. Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka daftar proyek yang masih berstatus KDP, penyebab keterlambatan, target penyelesaiannya, serta potensi dampaknya terhadap APBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya. Selain menyoroti besarnya nilai KDP, Fraksi NasDem juga mencermati rendahnya serapan belanja modal serta tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Menurut Dimas, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masih perlu dibenahi. Fraksi NasDem berharap pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek pembangunan agar anggaran daerah dap





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Tanam 644 Pucuk Merah, Wabup Mimik Ajak PKL dan Warga Bersama Jaga Kebersihan Sidoarjo



SIDOARJO, MEDIASOROTMATA.COM – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana memimpin kegiatan penanaman pohon dalam program 1 PNS 1 Pohon Gelombang IV di sepanjang Jalan Raya Gading Fajar 2, Perum Sidokare hingga Desa Sepande, Kecamatan Candi, Jumat (3/7/2026). Kegiatan penghijauan tersebut dilaksanakan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Peternakan Kabupaten Sidoarjo, PLN Sidoarjo, serta RSIA Ibu dan Anak Pondok Jati. Sebanyak 644 bibit pucuk merah ditanam di sepanjang ruas jalan tersebut sebagai upaya memperluas ruang hijau sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih teduh, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Mimik Idayana juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di kawasan tersebut. Menurutnya, kesempatan berjualan yang telah diberikan pemerintah harus diimbangi dengan kesadaran menjaga kebersihan. “Saya mohon kepada para PKL yang sudah diberikan kesempatan untuk berjualan di sini agar benar-benar menjaga kebersihan. Sampahnya jangan ditinggalkan begitu saja. Kalau memungkinkan, sampahnya dibawa pulang. Jangan dibuang sembarangan sehingga membuat lingkungan menjadi kotor,” tegasnya. Hj. Mimik Idayana mengatakan, penanaman pohon tidak hanya bertujuan mempercantik kawasan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan merawatnya. Ia berharap masyarakat, termasuk warga sekitar dan para PKL, ikut berpartisipasi menjaga pohon-pohon yang telah ditanam agar dapat tumbuh dengan baik. “Sebanyak 644 pohon yang kita tanam hari ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Saya berharap seluruh masyarakat ikut menjaga pohon-pohon ini karena manfaatnya akan kembali kepada kita semua,” ujarnya. Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Mimik Idayana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya peduli lingkungan dimulai dari diri sendiri. Menurutnya, mewujudkan Sidoarjo yang indah, hijau, bersih, dan nyaman merupakan tanggung jawab bersama. “Mari kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Bersama-sama kita wujudkan Sidoarjo yang lebih baik, lebih hijau, lebih asri, serta memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (NURI)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Transformasi Layanan Kesehatan Dimulai: Wabub Sidoarjo Beri Amanah
Besar Pada 29 Pimpinan Puskesmas



SIDOARJO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membangun pelayanan kesehatan primer yang semakin profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat kembali ditegaskan. Bertempat di Pendopo Delta Wibawa, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, secara resmi mengukuhkan 29 Kepala UPTD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Rabu (1/7/2026). Momentum ini bukan sekadar seremonial pergantian kepemimpinan, melainkan tonggak penting dalam memperkuat fondasi pelayanan kesehatan yang cepat, responsif, humanis, dan berkualitas. Dalam arahnya, Mimik Idayana menekankan bahwa jabatan kepala Puskesmas merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, empati, dan dedikasi. Menurutnya, Puskesmas adalah garda terdepan pelayanan publik yang menjadi representasi nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. "Saya titip kepada kepala Puskesmas yang dikukuhkan hari ini agar selalu ingat bahwa jabatan ini adalah ladang ibadah. Masyarakat yang datang ke Puskesmas menginginkan pelayanan yang cepat, ramah, memperoleh informasi yang jelas, serta diperlakukan dengan baik," tegasnya. Ia mengingatkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kecanggihan fasilitas atau kompetensi tenaga kesehatan, tetapi juga dari ketulusan dalam melayani. Senyum, sapaan hangat, dan sikap penuh empati diyakini mampu memberikan energi positif bagi pasien yang sedang berjuang memulihkan kesehatannya. "Layani masyarakat dengan senyuman. Bagi orang yang sedang sakit, senyum dan sapaan yang tulus bisa menjadi semangat bagi mereka untuk sembuh," ujarnya. Lebih jauh, Wakil Bupati mengajak seluruh kepala Puskesmas untuk membangun kepemimpinan yang hadir di tengah pelayanan, bukan sekadar mengendalikan administrasi dari balik meja kerja. Kehadiran pemimpin di lapangan dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap proses pelayanan berjalan efektif, cepat, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. "Sekecil punjengpun turun langsung melihat bagaimana pelayanan di Puskesmas. Pastikan masyarakat sudah terlayani dengan baik, terutama pada bagian administrasi yang menjadi pintu pertama pelayanan," pesannya. Mimik juga menegaskan bahwa kepemimpinan sejati dibangun melalui keteladanan, bukan semata-mata instruksi. Semangat kerja, kedisiplinan, dan kekompakan yang ditunjukkan seorang pemimpin akan menjadi energi positif bagi seluruh jajaran dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima. "Kalau pimpinannya semangat dan disiplin, bawahannya juga akan mengikuti. Yang penting kompak. Kalau tim solid, pelayanan kepada masyarakat pasti akan semakin baik," ungkapnya. Selain peningkatan mutu pelayanan kesehatan, Mimik memberikan perhatian khusus terhadap tantangan kesehatan masyarakat yang masih dihadapi Kabupaten Sidoarjo, terutama tingginya kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di wilayah Krian dan Porong. Ia mengajak seluruh kepala Puskesmas untuk memperkuat langkah preventif melalui edukasi, deteksi dini, pendampingan, serta kolaborasi lintas sektor. "Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Mari kita bantasi HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo melalui upaya pencegahan, edukasi, deteksi dini, dan pendampingan kepada masyarakat," katanya. Menurutnya, profesionalisme tenaga kesehatan yang

berpadu dengan pelayanan yang tulus akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Saya percaya dengan tenaga kesehatan yang profesional serta pelayanan yang tulus, masyarakat akan benar-benar merasakan hadirnya pemerintah," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhamik Herawati Yuwantina, M.Kes., menjelaskan bahwa pengukuhan 29 Kepala UPTD Puskesmas merupakan bagian dari strategi besar penguatan tata lola pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Sidoarjo. Ia berharap seluruh kepala Puskesmas mampu menghadirkan budaya kerja yang profesional, adaptif, inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus berorientasi pada peningkatan mutu layanan. "Kami berharap seluruh kepala Puskesmas dapat memperkuat manajemen pelayanan, meningkatkan mutu layanan kesehatan, membangun kolaborasi dengan seluruh tenaga kesehatan, serta memastikan setiap masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas," ujarnya. Pengukuhan tersebut menjadi simbol dimulainya babak baru pelayanan kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dengan kepemimpinan baru di 29 UPTD Puskesmas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis pelayanan kesehatan primer akan semakin profesional, inklusif, humanis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, serta berkelanjutan. Sebanyak 29 kepala UPTD Puskesmas yang dikukuhkan akan memimpin Puskesmas di berbagai wilayah Kabupaten Sidoarjo, sekaligus mengemban amanah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, memperkuat upaya promotif dan preventif. Lanjut, serta memastikan setiap warga memperoleh akses pelayanan kesehatan yang semakin baik sebagai wujud nyata transformasi pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Ia diingatkan, saya juga dapat membuat versi bergaya rita pers Kominfo yang lebih megah, dengan gaya penulisan setara siaran pers kementerian atau Istana Kepresidenan.

